

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam beberapa bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang adalah karena adanya sengketa pengklaiman tanah antara pihak kaum Datuak Sati dengan Pemerintah Nagari Simawang. Kedua pihak yang bersengketa sama-sama bersikeras mengklaim bahwa tanah pasar nagari tersebut merupakan milik masing-masing pihak. Akan tetapi, klaim tersebut belum didukung oleh bukti yang kuat berupa sertifikat resmi kepemilikan tanah. Bukti sementara yang baru bisa ditunjukkan oleh kedua belah pihak hanya berupa surat pernyataan kaum Datuak Sati yang hanya ditanda tangani oleh datuak-datuak sesukunya. Sedangkan surat kepemilikan tanah pada pemerintah nagari hanya ditanda tangani oleh camat tanpa adanya badan resmi seperti BPN. Meskipun berbagai upaya dan negosiasi telah dilakukan, hingga saat ini permasalahan tersebut masih belum menemui titik terang, sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan pasar Nagari Simawang.
2. Secara umum, upaya-upaya penyelesaian konflik yang telah ditempuh masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terlihat dari jaranginya pelaksanaan rapat diantara pihak yang bersengketa serta pelaksanaan rapat yang terkesan baru dilakukan apabila keadaan mulai memanas saja. Dari dua kali rapat

yang telah dilakukan ternyata masih belum menghasilkan jalan keluar disebabkan oleh tidak adanya pihak yang mau mengalah. Proses negosiasi yang rumit semakin memperburuk upaya penyelesaian konflik tersebut. Berikut adalah diantaranya penyebab yang membuat proses negosiasi menjadi rumit :

a. Pada saat proses negosiasi, pihak kaum Datuak Sati maupun pihak pemerintah nagari sama-sama tidak melibatkan pihak ketiga, proses negosiasi menjadi alot akibat tidak adanya pihak netral yang menengahi dan mengarahkan untuk upaya penyelesaian konflik.

b. Pemerintah nagari terlihat kurang serius dalam menyelesaikan sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang tersebut. Pemerintah Nagari seakan-akan menyalahkan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang tidak siap untuk melakukan pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang. Padahal, semestinya pemerintah nagarilah yang harus lebih dahulu membuat peraturan yang berkaitan dengan Pasar Nagari Simawang bersama BPRN.

c. Ketua KAN Simawang kurang memahami akan tugasnya sebagai ketua KAN, dimana semestinya peran ketua KAN adalah untuk menyelesaikan masalah menyangkut tentang adat-adat termasuk tanah ulayat. Karena tanah Pasar Nagari Simawang merupakan tanah ulayat kaum, maka ketua KAN harus lebih tegas dan bekerjasama bersama nagari untuk menyelesaikan masalah sengketa, bukan hanya menunggu pemerintah nagari dan BPRN

yang membuat peraturan yang bersangkutan dengan Pasar Nagari Simawang.

4.2 Saran/ Rekomendasi

Setelah melihat dan menganalisa permasalahan yang terjadi di lapangan, sengketa pengembangan pembangunan Pasar Nagari Simawang antara kaum Datuak Sati dan pemerintah nagari tidak akan berkepanjangan jika permasalahan segera diselesaikan dengan upaya yang efektif. Untuk itu, peneliti memberikan beberapa saran agar upaya penyelesaian konflik menjadi lebih efektif, yaitu :

1. Masing-masing pihak harus mengenyampingkan kepentingan masing-masing dan tidak sama-sama keras dalam proses negosiasi yang dilakukan.
2. Pemerintah nagari harusnya lebih serius dan bertindak tegas dalam menyelesaikan sengketa pengembangan Pasar Nagari Simawang. Pemerintah harus berupaya agar rapat negosiasi bisa dilakukan secara teratur dan berkelanjutan sehingga, semakin sering terjadinya rapat dan dan negosiasi, diharapkan bisa mempercepat penyelesaian konflik
3. Kedua pihak harus menggunakan pihak ketiga sebagai penengah yang netral dan tidak berpihak sehingga apabila terjadi perdebatan, maka penengah tersebut bisa mendamaikan dan mengarahkan rapat kepada tujuan utama yaitu penyelesaian konflik.
4. Semestinya KAN ikut berpartisipasi dalam membuat peraturan dengan pemerintah nagari dan BPRN, berkaitan dengan Pasar Nagari Simawang, bukan hanya sekedar menunggu pemerintah nagari dan BPRN.